

**PROBLEMATICS OF POST-DISASTER PROCESS REHABILITATION AND
RECONSTRUCTION USING COMMUNITY PARTICIPATIVE METHOD
PROBLEMATIKA PROSES REHABILITASI & REONSTRUKSI PASCA BENCANA
MENGUNAKAN METODE PARTISIPATIF MASYARAKAT**

Ira Modifa¹, Robert Tua Siregar², Rudi Salam Sinaga³

¹Jl. Sisingamangaraja Barat Pematangsiantar. Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Simalungun

¹Jl. Kolam No 1. Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area

Email: tuasirobert@usi.ac.id

Abstract

In the handling of the 2004 Aceh Tsunami Disaster and the 2004 Nias Earthquake, many parties as providers of assistance used a community-based rehabilitation and reconstruction development model one of which is UN-HABITAT under the auspices of the United Nations, This study aims to find the most effective and fair participatory postmortem participatory development guidelines for disaster-affected communities through case studies of Aceh Nias Settlement Support Program (ANSSP) 2005-2007. Analytical descriptive methods are used to obtain data. Data collection techniques used literature study and documentation study. The results of the study found that participatory community-based development, especially post-disaster handling, has proven good results. The literature study, interview and ANSSP report book 2007 published by UN - Habitat, illustrates that the participatory development model is able to answer all negative factors.

Keywords: Disaster, community-based development, Rehabilitation and reconstruction.

Abstrak

Dalam penanganan Bencana Tsunami Aceh dan Gempa Nias tahun 2004 banyak pihak sebagai pemberi bantuan menggunakan model pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis masyarakat salah satunya adalah UN-HABITAT yang berada di bawah naungan United Nations, Penelitian ini bertujuan untuk mencari pedoman metode pembangunan partisipatif masyarakat pasca bencana yang paling efektif dan berkeadilan bagi masyarakat yang terkena bencana melalui studi kasus proyek Aceh Nias Settlement Support Program (ANSSP) 2005 – 2007. Metode deskriptif analitis digunakan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pembangunan berbasis partisipatif masyarakat khususnya penanganan pasca bencana telah membuktikan hasil yang baik. Studi literatur, wawancara dan buku laporan ANSSP 2007 yang dipublish oleh UN – Habitat, menggambarkan bahwa model pembangunan partisipatif tersebut mampu menjawab semua faktor – faktor negatif

Keywords: Bencana, pembangunan berbasis masyarakat, Rehabilitasi dan rekonstruksi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik yang saling bertabrakan, terletak pada the ring of fire, terletak di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada lintang rendah di daerah iklim tropika basah. Berada pada patahan lempeng bumi sering menyebabkan gerakan bawah bumi sehingga menimbulkan berbagai bencana dasyat di berbagai wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia sudah harus mempersiapkan kondisi tanggap bencana yang bisa terjadi kapan saja.

Bencana Tsunami dan Gempa Aceh Nias pada 2004 lalu, mendatangkan banyak bantuan dari berbagai belahan dunia. Kepedulian dan berbagai perjanjian Internasional telah mengundang bantuan dan dana sehingga proses tanggap bencana hingga proses rekonstruksi dan rehabilitasi bisa diselesaikan walau memakan waktu yang tidak sedikit.

UN-HABITAT adalah salah satu organisasi dibawah bendera United Nations. Sejak berdiri tahun 1976, UN-HABITAT telah membantu masyarakat membangun tempat tinggal dan permukiman. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan dana dengan kontrak masyarakat. Pertimbangan dasar pemberian dana ini adalah supaya warga dapat memanfaatkan potensi yang ada ditengah mereka sehingga masyarakat bisa membangun kembali kehidupan mereka secara kontekstual.

Studi ini bertujuan untuk mencari pedoman metode pembangunan partisipatif masyarakat pasca bencana yang paling efektif dan berkeadilan bagi masyarakat yang terkena bencana melalui studi kasus proyek Aceh Nias Settlement Support Program (ANSSP) 2005 – 2007.

KAJIAN TEORI

Pembangunan partisipatif masyarakat (Community Driven Development).

Secara etimologi, kata partisipatif berasal dari bahasa latin “ Pars “ yang artinya bagian, peran serta atau keikutsertaan. Partisipatif adalah proses tumbuhnya kesadaran antar masyarakat. Adisasmita (2006) mengatakan bahwa keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keterlibatan masyarakat ini adalah bentuk pemberdayaan masyarakat secara efisien dan SDM, dana, sarana dan teknologi).

Metode pembangunan Partisipatif masyarakat ini khususnya pasca bencana dipakai karena proses partisipatif masyarakat menimbulkan kepercayaan terhadap warga dan mengakui bahwa mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dalam menentukan prioritas, pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri. Menurut Theresia Aprilila, dkk (2014) pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber-daya yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Karena itu, pembangunan berbasis masyarakat seharusnya pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh elit masyarakat yang merasa tau dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang lebih cocok bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka yaitu studi dokumentasi meliputi referensi yang relevan dengan penelitian meliputi peraturan perundang – undangan, buku – buku, jurnal ilmiah dan data - data dari website. Sementara itu,

penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pihak - pihak terkait, diskusi diskusi forum dan survey lapangan akan implementasi proyek secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana**

Bencana bukan lagi dianggap fenomena alam yang sporadis biasa. Tetapi bencana sebisa mungkin direspon dengan baik dan ditangani sebaik mungkin sehingga pasca bencana tidak menjadi bencana berikutnya bagi korban.

Yang penting dipahami dan dipelajari adalah potensi kerusakan yang diakibatkannya, dampak terhadap korban dan pemenuhan hak keadilan sosial kepada masyarakat yang mengalami bencana. Isu keadilan sosial ini terkait kuat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau otoritas yang ada. (Douglas, 2001 : 34) Disebutkan pemenuhan hak sosial meliputi 3 hal penting yaitu kekuasaan (power), keadilan (justice) dan Legitimacy (kekuasaan).

Respon bencana alam umumnya dibagi atas 2 siklus yaitu tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi. Ini juga yang menjadi siklus penangulan yang terjadi di Aceh dan Nias. Sesudah siklus tanggap darurat mulai stabil, maka siklus penting berikutnya adalah bagaimana mengembalikan kehidupan normal kepada masyarakat yang terkena bencana.

Rehabilitasi dan rekonstruksi secara bersama sama menuju pemulihan jangka panjang yang mempertimbangkan faktor fisik dan non fisik dari wilayah yang terpapar bencana. Berdasarkan UU no 24 tahun 2007 pasal 56 menyebutkan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, perbaikan dan bantuan perumahan, pemulihan sosial dan

psikologis, pelayanan kesehatan dan pemulihan ekonomi dan budaya serta keamanan dan ketertiban.

Kompleksitas dan besarnya skala tsunami aceh telah menciptakan suatu tantangan yang cara penangulangannya harus dirancang sebaik mungkin. Un – HABITAT bekerja sama dengan UNDP (United Nations Development Programme) telah membantu 3.450 keluarga korban dengan membangun kembali rumah rumah mereka di enam kabupaten (Aceh besar, Banda Aceh, Pidie, Simelue, Nias dan Nias selatan). Sejak awal UN- HABITAT telah mengusulkan agar “proses pemulihan” ini mengutamakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini diwujudkan mulai tahap Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pengawasan. Hasil dari penelitian menyebutkan prioritas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditetapkan pada lima sektor, yaitu:

1. Perumahan dan infrastruktur permukiman, meliputi pembersihan lahan untuk relokasi dan program cash for work, pembangunan perumahan dan infrastruktur permukiman.
2. Infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, dermaga, dan energi untuk menjamin bahwa masyarakat yang berada di tiga pulau terdampak tsunami mendapat manfaat dari rekonstruksi dan percepatan pembangunan.
3. Ekonomi, yaitu fasilitasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan komunitas dan pelatihan kemampuan di bidang agro-forestry, perikanan, dan program industri kecil.
4. Sosial, yaitu revitalisasi pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, di lokasi permukiman yang baru.
5. Lintas sektor, meliputi pemulihan lingkungan ekosistem wilayah

pebisnis dan pembangunan kantor pemerintahan di lokasi permukiman baru.

Kunci sukses pembangunan partisipatif masyarakat berdasarkan analisa dan testimoni warga langsung adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap langkah proses rekonstruksi mulai dari memutuskan desain, memilih pemasok, bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan mengatur keseluruhan tahap konstruksi.

Apa yang diharapkan dari model pembangunan Partisipatif masyarakat dan apa saja persyaratannya?

Pengambilan Keputusan

Hasil penelitian dan wawancara terhadap korban bencana Tsunami Aceh dan Gempa Nias 2004 menyatakan, bahwa proses partisipatif masyarakat memungkinkan modal sosial dan kemampuan pengambilan keputusan dalam masyarakat dimaksimalkan. Mobilisasi modal sosial ini butuh usaha dan respon yang cepat dan besar dikarenakan mayoritas korban bencana masih mengalami trauma dan takut menghadapi masa depan. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat mengembalikan keyakinan dan gairah mereka untuk menghadapi masa depan.

Pembentukan Komisi masyarakat

Kelompok kerja (Pokja) diperlukan untuk implementasi pembangunan partisipatif masyarakat. Pokja ini sebaiknya dipilih langsung dari antara korban bencana dan dipilih oleh warga lokal dari area atau wilayah yang terkena dampak bencana. Syarat utama dari penelitian yang dilakukan adalah orang-orang yang terbentuk dalam pokja harus memiliki motivasi kebersamaan yang kuat, ada keahlian sesuai kebutuhan dan dipilih secara mayoritas oleh masyarakat. Pokja –

pokja ini kemudian harus mendapat pelatihan dan pendampingan teknik dari Pendamping yang sudah direkrut sesuai kapasitas dan keahlian yang diperlukan selama proses pembangunan.

Rencana Aksi masyarakat (The Community Action Plan)

Merupakan satu metode yang umum digunakan untuk membangun kapasitas dari anggota masyarakat didalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat yang mampu menjawab permasalahan, kebutuhan dan sumber – sumber potensial yang ada ditengah masyarakat itu sendiri. CAP sendiri akan menjadi kerangka kerja bagi pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat.

Tata Kelola Dana

Hal penting lainnya yang diperoleh dari hasil studi menunjukkan proses pengelolaan dana juga harus kuat dan dapat diandalkan. Berbagai sistem dan instrumen harus dibangun sehingga tata kelola dan pertanggung jawaban di tengah masyarakat bisa dilakukan dengan maksimal dan meminimalkan resiko penyelewengan dan penyalahgunaan. Sistem penyaluran dana melalui kelompok-kelompok kerja dan sistem perbankan sederhana juga bisa menjadi instrumen kendali dalam penggunaan dana pembangunan.

Managemen konflik

Management konflik juga menjadi nilai penting yang didapat selama pengamatan proses pembangunan partisipatif. Model keterlibatan masyarakat dan instrumen – instrumen kendali tidak selalu menjadi jaminan proses pembangunan bebas konflik. Oleh sebab itu, masyarakat juga harus diberi pemahaman dan pendampingan bila mana konflik antar masyarakat timbul sehingga tidak mengganggu jalannya pembangunan.

- ***Migitasi Resiko***

Migitasi resiko adalah persoalan sulit pada masa pasca bencana. Proyek ANSSP memberi pelajaran pentingnya migitasi resiko dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan yang memprioritaskan kesiapan dan pencegahan sebagai bagian dari proses pembangunan jangka panjang.

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia yang merupakan daerah kepulauan dan sangat luas wilayahnya, namun berada di posisi geografis yang sering tidak menguntungkan. Posisi patahan lempeng bumi, banyaknya gunung berapi, kebakaran hutan, banjir yang bisa melanda kapan saja dan masih banyak lagi faktor potensi penyebab bencana.

Tentu ini adalah kondisi alam yang tidak semuanya bisa dihindari. Korban bencana mengalami trauma dan kehilangan yang mendalam sehingga sering menyisakan persoalan sosial baru. Ketidakpercayaan dan ketakutan dari pihak eksternal juga sering menjadi penyebab sulitnya pembangunan pasca bencana berlangsung secara keadilan sosial. Ditambah lagi model otoritas dan pengalaman birokratis yang sering tidak menyentuh langsung masyarakat sebagai korban bencana alam.

Dari hasil penelitian dan studi lapangan langsung ini, dapat disimpulkan pembangunan berbasis partisipatif masyarakat khususnya penanganan pasca bencana, telah membuktikan hasil yang baik. Studi literatur, wawancara dan buku laporan ANSSP 2007 yang dipublish oleh UN – Habitat, menggambarkan bahwa model pembangunan partisipatif tersebut mampu menjawab semua faktor – faktor negatif seperti dijelaskan diawal kesimpulan. Masyarakat mampu merasa hidup kembali, berperan aktif dalam setiap prosesnya sehingga tujuan yang paling penting dari sebuah proses pembangunan partisipatif dapat dipenuhi, yaitu

bagaimana masyarakat bisa dengan puas menerima hasil pembangunan dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik dan kemajuan masa depan mereka kembali.

Bencana sering kali berdampak menghancurkan. Tetapi Lesson and learn dari proses pembangunan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami dan gempa Aceh Nias 2004 telah menjadi katalisator perubahan yang luar biasa. Proses rekaman perubahan tersebut telah disaksikan bahwa Aceh dan Nias 14 tahun pasca bencana telah tumbuh menjadi daerah yang maju dan berkontribusi terhadap perkembangan peradaban masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. Membangun desa partisipatif. Yogyakarta.
- Aceh Nias Settlement Support Program Guideline, 2007 Volume 2. Community Action Plan.
- Anchoring Homes, UN – HABITAT's People Process In Aceh and Nias after Tsunami. 2007.
- Douglas, Mary. 2001. Risk & Blake. New York ; taylor & Francis
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- UNDP/c, 1992. Tinjauan Umum Manajemen Bencana, UNDRO.